

**KONSEP *AHLIYYAH* DALAM HADIS TENTANG AMANAH:
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KHĀLED ABOŪ EL-FADL DAN
RELEVANSINYA TEHADAP POLITIK IDENTITAS**



Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
MUHAMMAD KHALIL QIBRAN
NIM. 21105050061

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-914/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP *AHLIYYAH* DALAM HADIS TENTANG AMANAH: PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL-FADL DAN RELEVANSINYA TERHADAP POLITIK IDENTITAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHALIL QIBRAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050061
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684b483be4865



Pengaji II
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684b989d9c739



Pengaji III
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 684a2cd8cf9a0



Yogyakarta, 28 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abor, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684b62327cc06

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khalil Qibran
NIM : 21105050061
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : KONSEP AHLIYYAH DALAM HADIS TENTANG AMANAH:
(PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KHĀLED ABOŪ EL-FADL
DAN RELEVANSINYA TEHADAP POLITIK IDENTITAS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2025
Penulis



Muhammad Khalil Qibran
NIM. 21105050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Khalil Qibran
NIM	:	21105050061
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Judul Skripsi	:	KONSEP AHLIYYAH DALAM HADIS TENTANG AMANAH: (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KHĀLED ABOŪ EL-FADL DAN RELEVANSINYA TEHADAP POLITIK IDENTITAS)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2025
Pembimbing


Asru, M.Hum.
NIP: 198508092019031007

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relevansi konsep *ahlīyyah* (kompetensi) dalam hadis riwayat Abū Hurairah tentang amanah terhadap fenomena politik identitas di Indonesia. Meningkatnya fenomena politik yang memanfaatkan unsur-unsur agama, kesukuan, dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) setelah rangkaian pemilihan umum 2014, kontestasi Gubernur DKI Jakarta 2017, serta pemilihan umum periode 2019-2024 dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap integrasi nasional dan prinsip-prinsip fundamental Pancasila. Dengan menerapkan metodologi penelitian bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini melakukan analisis mendalam terhadap hadis bertemakan amanah yang terdapat dalam kompilasi *Shahīh Bukhārī* nomor 6496, ditinjau menggunakan perspektif hermeneutik yang dikembangkan oleh pemikir Khāled Aboū El-Fadl. Teknik analisis meliputi *takhrij* hadis, *i'tibār* sanad, dan penafsiran makna asli, historis, signifikan, serta implikatif dari hadis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Abū Hurairah menegaskan penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya (*ghairu ahlīhī*) merupakan bentuk penyia-nyiaan amanah yang berpotensi memicu kehancuran sosial. Melalui pendekatan hermeneutika, terungkap bahwa makna asli hadis menekankan kepemimpinan berbasis kompetensi dan integritas, sementara konteks historisnya terkait dengan tata kelola masyarakat Madinah yang mengedepankan meritokrasi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, konsep *ahlīyyah* menawarkan kriteria objektif (kompetensi, keadilan, dan moral) untuk mengevaluasi pemimpin, sehingga dapat menjadi antitesis terhadap politik identitas yang eksklusif dan primordial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan wacana *ahlīyyah* dapat mendorong pergeseran dari politik identitas menuju politik kebangsaan yang inklusif berbasis Pancasila dan nilai-nilai universal, sekaligus memperkaya diskursus demokrasi substantif di Indonesia.

Kata Kunci: *Ahlīyyah*, Politik Identitas, Hadis Abū Hurairah, Hermeneutika, Kepemimpinan Islam, Demokrasi Indonesia

ABSTRACT

This research examines the relevance of the concept of *ahlīyyah* (competence) in the hadīth narrated by Abū Hurairah about trustworthiness to the phenomenon of identity politics in Indonesia. The increasing political phenomenon that utilizes elements of religion, ethnicity, and SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup) issues after the 2014 general election series, the 2017 Jakarta gubernatorial contest, and the 2019-2024 general election is considered a significant threat to national integration and the fundamental principles of Pancasila. By applying a qualitative research methodology and using a literature study approach, this study conducts an in-depth analysis of the hadith on the theme of amanah contained in the compilation of Sahih Bukhārī number 6496, reviewed using a hermeneutic perspective developed by the thinker Khāled Aboū El-Fadl. The analysis techniques include *takhrīj* (hadith source verification), *i'tibār sanad* (chain of narration validation), and interpretation of the original, historical, significant, and implicative meanings of the hadith. The results show that Abū Hurairah's hadith emphasizes that entrusting affairs to those who are not qualified (*ghairu ahlihi*) constitutes a betrayal of trust that could potentially trigger social destruction. Through the hermeneutical approach, it is revealed that the original meaning of the hadith emphasizes leadership based on competence and integrity, while its historical context relates to the governance of Medinan society that prioritized meritocracy. In contemporary Indonesian context, the concept of *ahlīyyah* offers objective criteria (competence, justice, and morality) for evaluating leaders, thus serving as an antithesis to exclusive and primordial identity politics. This research concludes that the development of *ahlīyyah* discourse can encourage a shift from identity politics toward inclusive national politics based on Pancasila and universal values, while enriching the discourse of substantive democracy in Indonesia.

Keywords: *Ahlīyyah*, Identity Politics, Abū Hurairah's Hadith, Hermeneutics, Islamic Leadership, Indonesian Democracy

MOTTO

كُلُّ مَا يَسْتَطِيْعُهُ غَيْرُكَ، يَحْبُّ أَنْ تَسْتَطِيْعَهُ أَنْتَ

“Segala apa yang Orang lain mampu melaksanakannya,
engkaupun harus mampu pula”

-K.H. Abdul Haris, M. Ag,-





Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Ahmad Kusairi dan ibunda tercinta Poniti Riska Ayu Wati (*The best parents of all time*)
2. Kakakku Siti Devia Mudharifatus Shalehah-Khoirul Anshori yang selalu memberi semangat dan nasihat
3. Muhammad Thariq Akbar, Adikku Tercinta
4. Seluruh keluarga saya baik di Jember maupun Banyuwangi
5. Kyai-kyai, guru-guru dan dosen-dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu baik yang bersifat religi maupun non-religi
6. Segenap keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pondok Pesantren Nurul Ummah, PMII Rayon Pembebasan dan IKPMJ (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jogja)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَشُكْرًا لِلَّهِ صَلَّاً وَسَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ
وَصَحْبِيهِ وَمَنْ وَالَّهُ أَعْلَمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji syukur atas karunia dan nikmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi berjudul "Konsep *Ahlīyyah* dalam Hadis Tentang Amanah: (Perspektif Hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl dan Relevansinya terhadap Politik Identitas)".

Tak lupa shalawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih baik seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca, khususnya dari kalangan akademisi dan pakar di bidang ini.

Perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ketulusan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Drs. Indal Abror, M.Ag. Sosok dosen yang saya jadikan motivasi untuk terus belajar dan mendalami core keilmuan hadis. Terima kasih Bapak.

4. Bapak Asrul, S.Th.I, M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti. Di samping kesibukannya, beliau begitu banyak meluangkan waktu demi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih bapak.
5. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis, yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan pengalaman selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga ini, juga segenap staf TU prodi maupun fakultas yang sudah membantu dalam administrasi penulisan tugas akhir dan seluruh kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa.
6. Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan layanan terkait berbagai literatur.
7. Keluarga peneliti yang selalu mendoakan dan men-support dengan penuh, terutama ayahanda (Ahmad Kusairi) dan ibunda (Poniti Riska Ayu Wati) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan penuh kepada penulis. Tak lupa kakak-kakak dan adik saya (Khoirul Anshori, Siti Devia Mudharifatus Shalehah, Muhammad Thorik Akbar) yang turut memberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih ayah dan mama.
8. Segenap keluarga besar H. Kholili (Nde Jupri, Nde Mur, Nde Farid, Lek Tul) dan semuanya tanpa terkecuali yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi. Wa bil khusus kepada almarhum pakle (H. Ahmad Said) yang sudah bahagia disurga-Nya, seseorang yang menjadi panutan dalam keluarga dan selalu mengingatkan arti penting kehidupan. Semoga keluarga kecil ini kekal sampai di akhirat aaamiiiin.
9. Bapak Prof. Dr. KH. Abdul Haris M.Ag, KH. Muslim Thoha, KH. Ahmad Zabidi Marzuqi Lc, terimakasih atas segala bimbingan, pendidikan, dan perhatian yang telah diberikan selama penulis tinggal di pondok pesantren (Al-Bidayah Jember, Al-Anwar Bondowoso dan Nurul Ummah Yogyakarta). Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang penuh barokah dan manfaat dunia-akhirat.
10. Teman-teman pejuang skripsi, teman-teman Asrama Mahasiswa Nurul Ummah, ILHA 21 *Family* (El-Istiqamah) yang telah memberikan warna

kehidupan selama menempuh pendidikan, terimakasih atas sambutan hangat dan rasa kekeluargaan yang telah teman-teman berikan.

11. Keluarga besar IKPMJ Yogyakarta, PASKER UIN Sunan Kalijaga, Forum Mahasiswa IKSPI Kera Sakti Jateng & DIY, PMII Rayon Pembelaan, teman-teman Mocopat Syafa'at dan Jama'ah Maiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak pengalaman dan skil baru kepada penulis. Terimakasih atas segala proses suka duka sebagai bentuk pendewasaan diri ini.
12. Teman-teman MBKM SD/SMP Teladan Yogyakarta dan KKN 114 UIN Sunan Kalijaga Desa Bakalan, Pasuruan. Terima kasih atas pengalaman hidup selama 45 hari, namun sangat berarti selamanya.
13. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan kajian hadis, khususnya dalam memahami konsep ahliyyah dan kontribusinya terhadap wacana politik identitas di era kontemporer. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat tidak hanya di dunia akademis tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Yogyakarta, 19 Mei 2025

Penulis

Muhammad Khalil Qibrain

NIM. 21105050061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z\al	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s{ad	s{	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ya

II. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

متعدين	ditulis	<i>Muta'qqidi>n</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ اللہ	ditulis	<i>ni'matullah</i>
زکۃ الفطر	ditulis	<i>zaka>tul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

أ Contoh: ضَرَبَ	fathah	ditulis	a <i>daraba</i>
إ Contoh: فَهِمَ	kasrah	ditulis	i <i>fahima</i>
ء Contoh: كُتُبٌ	dammah	ditulis	u <i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif Contoh: جاهليه	ditulis	a> (garis di atas) <i>ja>hiliyah</i>
2	Fathah + alif maqsur Contoh: يسعى	ditulis	a> (garis di atas) <i>yas 'a</i>
3	Kasrah + ya mati Contoh: مجيد	ditulis	i> (garis di atas) <i>maji>d</i>
4	Dammah + wawu mati Contoh: فروع	ditulis	u> (garis di atas) <i>furu>d</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati Contoh: بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati Contoh: قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

اللهم	ditulis	<i>a 'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qut'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiya>s</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah, ditulis Sama denfan Huruf Qamariyyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-sama></i> '
--------	---------	----------------------

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Dapat ditulis Menurut Penulisnya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z̄awi al-furud</i>
اھل السنۃ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN:.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHLIYYAH DAN AMANAH.....	28
A. Pengertian Ahlīyyah dalam Perspektif Islam.....	28
B. Klasifikasi dan Tingkatan Ahlīyyah.....	29
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ahlīyyah	30
D. Konsep Amanah dalam Islam	32
E. Hubungan Antara <i>Ahlīyyah</i> dan Amanah.....	35
F. Ahlīyyah dan Amanah dalam Konteks Sosial-Politik.....	37
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS TENTANG AMANAH RIWAYAT ABŪ HURAIRAH	39
A. Deskripsi Hadis	39
B. I'tibār Sanad.....	42

C. Informasi Sanad Hadis	49
D. Kritik Matan Hadis.....	62
E. Hermeneutika Hadis Tentang Amanah	68
1. Makna Asli Hadis Amanah	71
2. Makna Historis Hadis Amanah	72
3. Significant Meaning	74
BAB IV RELEVANSI PEMAHAMAN HADIS TENTANG AMANAH TERHADAP POLITIK IDENTITAS	77
A. Implication Meaning	77
B. Politik Identitas dalam Perspektif Hadis Amanah: Analisis Kontekstual..	82
C. Tinjauan Kritis terhadap Interpretasi Hadis Amanah dalam Konteks Politik Identitas	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik Indonesia pada dasarnya memiliki nilai positif, namun penerapan yang tidak tepat menjadikannya bernuansa negatif. Fenomena penguatan identitas dalam perpolitikan mulai termanifestasi sejak persaingan pemilihan presiden 2014 dan pemilihan kepala daerah Jakarta 2017, yang kemudian berakibat pada memburuknya kohesi sosial dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Fenomena ini ditandai dengan munculnya fanatismus pendukung yang kuat, terutama dalam aspek keagamaan dan kesukuan. Dampaknya masih terasa hingga pelaksanaan pemilu 2024 yang masih diwarnai isu-isu berbasis identitas.

Politik identitas telah menjadi fokus diskusi publik yang signifikan, mencakup praktik politik yang mengedepankan identitas agama, etnis, dan sosial - berbeda dengan politik berbasis kebutuhan. Hal ini menciptakan kelompok-kelompok yang terikat oleh kesamaan nilai religius, budaya, dan etnis, yang seringkali terpisah dari kelompok dominan dan menghadapi tekanan politis. Media massa, seperti Kompas, aktif mengangkat isu ini melalui artikel-artikel yang membahas pentingnya dialog keagamaan¹ dan kewaspadaan terhadap manipulasi opini berbasis identitas menjelang pemilu 2024², sambil mengingatkan potensi dampak negatifnya terhadap persatuan bangsa.

Politik merupakan serangkaian proses yang bertujuan membangun dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aktivitas dalam sistem politik negara untuk menentukan dan mengimplementasikan tujuan-tujuan tertentu, serta membentuk sistem kenegaraan yang solid. Dalam konteks ini, politik dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian proses sistematis yang membentuk dan

¹ Rebiyyah Salasah, ‘Tangkal Bahaya Politik Identitas Dengan Penguatan Dialog Lintas Iman’, 28 Januari, 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/28/tangkal-bahaya-politik-identitas-dengan-penguatan-dialog-lintas-iman?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic>.

² Ayu Nurfaizah, ‘Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024’, 2 Maret, 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic>.

mendistribusikan otoritas dalam lingkup masyarakat, yang terefleksikan melalui mekanisme pengambilan keputusan di ranah kenegaraan.³

Di Indonesia, politik identitas menjadi fenomena yang menonjol dalam kontestasi pilkada, terutama terkait aspek agama dan kesukuan. Praktik ini telah menjadi bagian integral dari strategi kampanye pemilihan umum, dengan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keberagaman Indonesia tercermin dalam data BPS 2010 yang mencatat 1211 bahasa, dengan 1158 di antaranya merupakan bahasa daerah, serta 1340 suku bangsa dengan dominasi suku Jawa sebesar 41%. Keputusan MK mengakui enam agama resmi untuk dicantumkan dalam KTP menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Namun, penggunaan berlebihan atas keberagaman ini dapat memicu konflik sosial, seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta, di mana Basuki Tjahaja Purnama terpengaruh oleh isu SARA meskipun memiliki rekam jejak kinerja yang baik.⁴

Sebagai bagian integral eksistensi manusia yang bersifat sosial dan dinamis, politik hadir sebagai keniscayaan. Setiap entitas individu maupun komunal dalam struktur masyarakat terikat pada seperangkat kaidah dan regulasi universal, sehingga politik menjadi cerminan dari evolusi kemanusiaan itu sendiri.⁵ Mengingat manusia adalah subjek utama politik, maka kajian politik tidak dapat mengabaikan faktor kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Anton H. Djawamaku (1985: 144) yang menekankan bahwa analisis politik berpusat pada pribadi manusia.

Keberagaman Indonesia yang tercermin dalam dimensi keagamaan, kesukuan, etnis, kebudayaan, hingga orientasi politik merupakan realitas yang telah mendapat pengakuan luas. Menurut analisis Hildred Geertz, wilayah Indonesia didiami oleh tidak kurang dari tiga ratus komunitas etnis dengan khazanah kultural distingifnya, beratus-ratus bahasa yang berbeda, serta beragam kepercayaan baik

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2002). h. 8

⁴ Andre Pebrian Perdana and Muslih S Hi, ‘Impact of Identity Politics in The Future 2024 General Elections’, 11.2 (2024), pp. 225–38.

⁵ Abdulkadir B Nambo and Rusdiyanto Puluhuluwa, ‘Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik’, XXI.2 (2005), pp. 262–85.

yang tergolong agama besar maupun sistem kepercayaan yang bersifat lokal.⁶ Kemajemukan ini dapat menjadi aset berharga bagi kemajuan bangsa jika dikelola dengan baik, namun sebaliknya dapat berpotensi menjadi sumber perpecahan dan konflik jika tidak ditangani secara tepat.⁷

Ketidakmampuan mengelola keragaman dengan baik dapat memicu perpecahan dan konflik, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 65, yang memperingatkan tentang potensi perpecahan di antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan;

فَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسْكُمْ شَيْئًا
وَيَنْذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغٍ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٦٥

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Yang Mahakuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu ke ganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami (Nya).⁸

Peringatan dalam ayat tersebut, khususnya mengenai perselisihan antar golongan, memiliki keterkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, yang memberikan perspektif tambahan tentang konsekuensi dari perpecahan dalam masyarakat;

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقَكُمْ} [الأنعام: 65]، قَالَ: «أَعُوذُ بِوْجْهِكَ»، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65] قَالَ: «أَعُوذُ بِوْجْهِكَ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلِسْكُمْ شَيْئًا وَيَنْذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغٍ بَعْضٍ} [الأنعام: 65] قَالَ: «هَاتَانِ أَهُونُ، - أَوْ أَيْسَرُ -

‘Abdullāh radliyallāhu ‘anhūmā berkata: "Ketika diturunkan kepada

⁶ Ismail Faisal, *Islam, Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia Dalam Suseptiawan, Dkk, Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan* (UII Press, 1997).

⁷ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar Dan Konsep Umum Sosial* (PT. Eresco, 1995).

⁸ ‘Al-Qur’ān Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya’ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān., 2019).

Rasūlullāh shallallāhu 'alaihi wa sallam ayat: '(Katakanlah, Dialah Allāh yang mampu mengutus siksa kepada kalian dari atas kamu)' (Qs. Al an'aam: 65), maka Rasūlullāh berdoa: 'Aku berlindung dengan wajah-Mu, '(Atau dari bawah kakimu)', Nabi berdoa: "Aku berlindung dengan wajah-Mu, "maka dikala diturunkan: '(atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan menjadikan sebagian di antara kalian merasakan keganasan sebagian yang lain)', maka Rasulullah bersabda: "Perpecahan dan keganasan konflik ini lebih ringan, atau beliau katakan 'lebih remeh.'" (H.R Bukhārī)⁹

Berdasarkan pemahaman atas hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Allāh memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman kapanpun, namun selama konflik belum mencapai tingkat yang parah, Allāh memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki perilaku mereka melalui sikap adil, lemah lembut, dan bijaksana dalam menjalankan tanggung jawab di dunia. Prinsip ini sejalan dengan situasi politik di Indonesia saat ini, dimana pengelolaan perbedaan yang baik dapat menjadi kekuatan penggerak kemajuan bangsa, sementara pengelolaan yang buruk dapat memicu perpecahan dan konflik.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik Indonesia mengalami transformasi dengan munculnya fenomena politik identitas, dengan isu agama sebagai elemen yang paling sensitif. Fenomena ini diprediksi akan tetap menjadi strategi dalam kontestasi politik menjelang pemilu 2024. Hal ini didasarkan pada kemampuan isu agama untuk mengaburkan pertimbangan rasional dan etis pemilih dalam menentukan pemimpin ideal, serta berpotensi menggesampingkan prestasi dan program kerja yang telah dijalankan oleh para pemimpin.¹⁰

Dinamika ini dapat dilihat dari kasus beberapa tokoh politik seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo, yang menghadapi framing berbasis agama dari lawan politik mereka. BTP menghadapi stigma terkait penistaan agama, Anies Baswedan dihadapkan pada persepsi sebagai "alat perlawanan" terhadap minoritas dan isu pribumi, sementara Ridwan Kamil

⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz 9*, ed. by Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, Pertama (Dar al-Turuq al-Najah). hal 101

¹⁰ Atmari, 'Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3.1, pp. 333–42.

dan Ganjar Pranowo, meskipun memiliki kedekatan dengan NU, masih menghadapi pertanyaan tentang ketaatan keagamaan mereka.¹¹

Realitas politik kontemporer di Indonesia menunjukkan keterkaitan erat antara politik dan agama, sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Bukhārī-Muslim yang memberikan perspektif tentang hubungan antara kedua aspek tersebut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُطِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قُلْبُهُ مُعْلَقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ تَحَايَا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَתْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٌ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعْتُ يَمِينُهُ (متفق عليه)

Artinya: Telah memberitakan kepada kita Dari Muhammad bin Salam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, ada tujuh golongan yang Allah lindungi dalam perlindungan-Nya, yaitu: Imam yang adil, pemuda yang terus menerus beribadah kepada Allah, orang yang selalu mengingat Allah ketika sendirian hingga matanya berair, orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang diajak kencan oleh wanita kaya dan cantik namun menjawab, 'Aku takut kepada Allah', dan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak menyadari perbuatan tangan kanannya."¹²

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa ketika politik memperoleh legitimasi religius yang positif, maka terjadi proses sakralisasi yang justru memperluas, bukan membatasi ruang gerak politik. Seperti analogi tembok kota yang bukan sebagai pembatas namun pelindung yang memungkinkan warganya beraktivitas dengan aman, agama berfungsi sebagai fondasi yang menguatkan aktivitas politik, bukan memisahkannya sebagai entitas yang bertentangan.

¹¹ Atmari, 'Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural'.

¹² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz 8*, ed. by Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, Pertama (Dar al-Turuq al-Najah).

Politik identitas mulai menarik perhatian ilmuwan sosial pada dekade 1970-an di Amerika Serikat, berawal dari isu-isu minoritas, gender, feminism, ras, dan etnisitas, kemudian berkembang mencakup aspek agama, kepercayaan, dan berbagai ikatan kultural.¹³ Dalam konteks Indonesia, politik identitas lebih berfokus pada isu etnis, ras, agama, ideologi, dan kepentingan daerah yang diartikulasikan oleh para elit. Fenomena pemekaran daerah menjadi manifestasi politik identitas, meski terkadang sulit membedakan antara kepentingan murni pembangunan daerah dengan ambisi politik elit lokal.

Sebagai konsep baru dalam ilmu politik, politik identitas yang juga dikenal sebagai biopolitik atau politik perbedaan, berfokus pada perbedaan-perbedaan yang muncul dari aspek fisik. Meskipun konsep ini telah lama ada dalam kajian filsafat, penggunaannya dalam ilmu politik baru mendapat pengakuan formal setelah disimpulkan pada pertemuan Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun 1994.¹⁴

Marshall dan Read, sebagaimana dikutip oleh Yosal Iriantara, mendefinisikan politik identitas sebagai fenomena pemisahan politik yang berakar pada identitas kelompok, bukan pada faktor ekonomi atau konflik kelas. Konsep ini mencakup isu-isu kultural seperti agama, etnisitas, gender, dan seksualitas. Politik identitas dipandang sebagai hasil dari kompleksitas modernitas yang mengikis sistem identitas tradisional berbasis kekerabatan. Identitas kelompok dalam konteks ini dilihat sebagai produk wacana dan kontestasi, bukan sekadar kategori sosial objektif, sehingga politik seringkali mewujud sebagai pertarungan budaya dan alat mobilisasi kolektif.¹⁵

Dalam era politik kontemporer, politik identitas menjadi ancaman terhadap nasionalisme dan pluralisme Indonesia.¹⁶ Pembentukan identitas, baik secara

¹³ Eric Hiariej Ahmad Syafii Maarif, Martin Lukito Sinaga, Siti Musdah Mulia, *Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. by Husni Mubarok, digital (Democracy Project: Yayasan Abad Demokrasi, 2012).

¹⁴ Ubed S Abdillah, *Politik Identitas Etnis Pergaulan Tanpa Tanda Identitas* (Indonesiatera, 2002).

¹⁵ Yosal Iriantara, *Politik Identitas Dan Kegiatan Ekstrakurikuler* (PPS Uninus, nomor 2).

¹⁶ Zahrotunnimah, ‘Sejarah Politik Identitas Dan Nasionalisme Di Indonesia’, 2 (2018).

parsial maupun interaksional, berpotensi menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek sosial. Identitas etnis dan agama menjadi elemen kunci dalam perubahan sosial ini, dimana politik identitas keagamaan dan perubahan sosial saling mempengaruhi dalam hubungan sebab-akibat yang kompleks.¹⁷

Politik identitas perlu ditransformasikan menjadi politik kebangsaan yang melampaui egoisme sektoral, kelompok, dan partikularistik. Politik kebangsaan yang berlandaskan Pancasila mencerminkan semangat kebhinnekaan yang menyatukan keragaman. Hal ini membutuhkan konsensus bahwa Indonesia adalah milik bersama, dengan prinsip kesetaraan, kesejahteraan umum, dan kedamaian berdasarkan tenggang rasa, yang semuanya dipayungi oleh ideologi Pancasila tanpa diskriminasi SARA, sebagaimana tercermin dalam hadis yang disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعْنِينَ حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذِنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيَّاً فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاؤلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلَا أَرَاكَ تَرْفِعِينَ صَوْنَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجِزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِي أَنْقُدْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا مُّثُمَّ اسْتَأْذِنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلُنِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا (رواه أبي داود)

Artinya: Telah memberi tahu kita, 'Abu Ishaq dari 'Abu Ishaq dari 'Al 'Aizar bin Huraiths dari An Nu'man bin Basyir, dari Yahya bin Ma'in, "Abu Bakar RA meminta izin untuk menemui Nabi SAW. Namun, ketika hendak masuk, ia mendengar suara 'Aisyah meninggi (seperti orang marah). Maka, Abu Bakar menarik 'Aisyah dan memukulnya setelah masuk, seraya berkata, "Mengapa aku melihatmu meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian melarangnya hingga Abu Bakar keluar dengan marah dan berkata, "Abu Bakar kemudian menolak untuk berbicara di rumah selama beberapa hari, setelah itu ia memohon izin lagi untuk menemui Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ia mendapatkannya telah berbaikan. Lantas ia berbakti kepada keduanya: "Sertakanlah aku dalam kedamaian kalian sebagaimana kalian telah menyertakanku dalam kemarahan kalian."

¹⁷ Sukamto, 'Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi "Lokalitas Dan Globalisasi")', *Sejarah Dan Budaya Universitas Malang*, 2 (2010).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menimpali: "Kami telah lakukan, kami telah lakukan."¹⁸

Politik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini mengalami berbagai dinamika dan transformasi yang kompleks. Pancasila sebagai dasar negara memang menjadi fondasi ideologis republik ini, namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak selalu konsisten sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Realitas politik Indonesia menunjukkan adanya berbagai periode dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari Era Demokrasi Liberal (1950-1957) dengan sistem multipartai yang relatif terbuka, Era Demokrasi Terpimpin (1957-1965) dengan dominasi kekuasaan eksekutif, Era Orde Baru (1966-1998) yang menekankan stabilitas namun dengan pendekatan otoritarianisme, hingga Era Reformasi (1998-sekarang) yang mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan.

Terkait permasalahan ini, terdapat hadis lain yang relevan dalam Kitab Shahih Bukhari karya Imam Bukhari, yang memberikan perspektif tambahan tentang isu tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلَىٰ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صُبِّغَتِ الْأَمَانَةُ فَإِنْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِصْبَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسِنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْتَظِرِ السَّاعَةَ. (صحيح البخاري)

Artinya: Telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Sinan dan Fulaih bin Sulaiman, bahwa Hilal bin Ali dari Atho bin Yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengabarkan kepada kami bahwa: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tergusuklah kehancuran itu".¹⁹

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz 4*, ed. by Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (al-Maktabah al-Asriyyah). hal 300

¹⁹ Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz 8*. hal 105

Hadis tentang amanah tersebut memberikan peringatan mendalam tentang pentingnya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sebuah prinsip meritokrasi yang universal. Pesan ini sangat relevan dengan fenomena politik identitas yang semakin menguat di Indonesia, khususnya pasca-Reformasi. Politik identitas muncul ketika pertimbangan etnis, agama, atau kedaerahan menjadi faktor dominan dalam pemilihan pemimpin, mengalahkan aspek kompetensi dan integritas yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Fenomena ini menciptakan berbagai dampak negatif bagi kehidupan berbangsa. Penggunaan sentimen identitas dalam kontestasi politik berpotensi melemahkan persatuan dan kebhinnekaan yang menjadi nilai dasar bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, hadis tersebut mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah suci yang harus diserahkan kepada orang yang benar-benar kompeten dan berintegritas, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan identitas atau popularitas semu yang tidak substansial.

Pemahaman hadis memerlukan inovasi metodologis yang diselaraskan dengan konteks sejarah dan realitas global kontemporer. Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi mengkaji relasi hadis dengan Al-Qur'an dalam memudahkan pemahaman ajaran Islam. Di tengah kebijakan pemerintahan Jokowi yang menekankan persatuan dengan membatasi politik identitas, muncul diskursus akademik menarik untuk mengkaji hal tersebut melalui perspektif historis dan pendekatan hermeneutika terhadap hadis. Kajian semacam ini dapat memberikan sumbangsih dalam memperkokoh eksistensi negara-bangsa Indonesia yang kini menghadapi potensi perpecahan.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan yang ada saat ini, maka berikut ini adalah uraian rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana hadis tentang amanah diinterpretasikan melalui metode hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl?
2. Bagaimana relevansi pemahaman hadis tentang amanah terhadap politik identitas?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada bagaimana tantangan telah didefinisikan:

1. Menganalisis dan mengungkap interpretasi hadis tentang amanah menggunakan pendekatan hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.
2. Mengkaji relevansi pemahaman hadis tentang amanah dalam konteks politik identitas untuk menemukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam dinamika politik kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. **Akademis:** Mengembangkan khazanah keilmuan hadis melalui pendekatan hermeneutika kontemporer, khususnya dalam memahami kriteria kepemimpinan Islam (ahliyah).
2. **Teoretis:** Memperkaya wawasan tentang integrasi nilai-nilai keislaman (konsep amanah dan ahliyah) dengan kajian politik identitas dalam konteks Indonesia.
3. **Praktis:** Memberikan perspektif etis-religius dalam menanggapi dinamika politik identitas, khususnya terkait pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas.
4. **Sosial:** Menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan sistem demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka meneliti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan membahas subjek serupa yang ingin diselidiki lebih lanjut oleh penulis. Dalam hal ini tentu telah banyak kajian ataupun penelitian-penelitian sebelumnya juga membahas tentang pembacaan terhadap diskursus hadis tentang hakikat politik identitas yang ditinjau dengan fokus kajian serta metode tertentu. Berikut penulis cantumkan beberapa paparan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pertama, Artikel dengan judul “Kepemimpinan dan Manajemen Islam” yang ditulis oleh Muh. Thoriq Aziz Kusuma, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta (2024). Artikel ini membahas gagasan tentang kepemimpinan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta karakteristik pemimpin Muslim, serta prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, keadilan, dan kepercayaan. Tujuan kepemimpinan Islam tidak hanya mencapai keuntungan duniawi tetapi juga memastikan kesejahteraan spiritual masyarakatnya.

Kedua, Artikel jurnal yang ditulis tahun 2024 Oleh Akhsa Alpar Mubarok, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Studi Pemahaman Masyarakat Dusun Pasir Malang tentang Hadis Etika Memilih Pemimpin”. Di dalamnya dijelaskan bahwa memilih pemimpin dalam perspektif Islam bukan hanya proses sosial-politik, tetapi juga aktivitas religius yang harus dilandasi oleh nilai-nilai etis yang digariskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Artikel tersebut menganalisis kesenjangan antara ajaran hadis tentang kriteria pemimpin ideal dengan praktik pemilihan pemimpin yang berlangsung di Dusun Pasir Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kedekatan kekerabatan, keuntungan ekonomi, dan pengaruh tokoh masyarakat lebih dominan mempengaruhi pilihan masyarakat dibandingkan dengan kriteria kepemimpinan yang diajarkan dalam hadis. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan literasi hadis di kalangan masyarakat pedesaan untuk memperkuat pemahaman tentang urgensi memilih pemimpin yang berintegritas.

Ketiga, Artikel berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Suami Gangguan Mental Perspektif *Istisnā’iyat At-Taklīf*” yang ditulis oleh Elvira Rahma Devi. Dalam penelitian tersebut Elvira mengkaji kasus dua keluarga di desa Mendak yang suaminya mengalami gangguan mental, sehingga tanggung jawab nafkah beralih kepada istri. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut menggunakan perspektif fikih muamalah dan konsep *Istisnā’iyat At-Taklīf* yang membahas pengecualian beban hukum bagi individu dengan kondisi khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri-istri tersebut harus mengambil peran

ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh keluarga, dengan sistem dukungan dari keluarga besar, tetangga, dan pemerintah setempat. Elvira juga mengidentifikasi bahwa kondisi gangguan mental yang dialami oleh suami termasuk dalam kategori "*awāridh ahlīyyah samawi*" yang mempengaruhi kapabilitas hukum mereka secara fluktuatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyesuaian dalam penerapan hukum keluarga Islam untuk kasus-kasus khusus seperti gangguan mental, sambil tetap mempertahankan prinsip perlindungan keluarga (hifz al-nasl) dalam maqasid syariah.

Keempat, "Tinjauan Fiqih Siyāsah tentang Politik Identitas dalam Pemilu Presiden 2019" merupakan judul tesis yang ditulis oleh Achmad Junaedy Muchtar, mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dalam tesis tersebut, peneliti menunjukkan bahwa politik identitas perlu dikaitkan dengan gagasan tentang identitas, atau yang sering disebut identifikasi diri. Selanjutnya, identitas diri dikaitkan dengan pemilih Indonesia yang pada hakikatnya moderat.

Kelima, Artikel yang berjudul "Praktik Pemenuhan Hak Akses Keagamaan Penyandang Disabilitas Sensorik berdasarkan Konsep *Ahlīyyah*" yang ditulis oleh Ahmad Bahrul Hikam tahun 2025. Dalam jurnal tersebut Bahrul menjelaskan konsep *ahlīyyah* (kecakapan hukum) sebagai landasan teoretis untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sensorik dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif fikih Islam, penyandang disabilitas sensorik dianggap memiliki *ahlīyyah* yang sama dengan individu lainnya dalam konteks kewajiban keagamaan. Bahrul mengidentifikasi bahwa konsep *ahlīyyah* berimplikasi pada pemberian *rukhsāh* (keringanan) yang disesuaikan dengan *masyaqqāh* (kesulitan) yang dialami penyandang disabilitas sensorik. Jurnal ini juga mendemonstrasikan aplikasi praktis dari konsep tersebut, seperti penggunaan alat *gyroscope bracelet* untuk tuna rungu yang menjadi imam, mushaf Braille untuk tuna netra, GPS smartphone untuk mobilitas ke tempat ibadah, penerjemah bahasa isyarat untuk dakwah, dan running *text* untuk akses khutbah bagi tuna

rungu-wicara. Penelitian ini berkontribusi signifikan pada pengembangan fikih inklusif yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sensorik dalam praktik keagamaan.

Keenam, Working Paper dengan judul “Analisis Politik Identitas Di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Habibi, mahasiswa FISIPOL Universitas Mulawarman Samarinda (2017). Di dalamnya peneliti menegaskan apa yang bernama politik identitas yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang dipahami secara benar dan cerdas.

Ketujuh, sebuah buku yang berjudul “Politik Identitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern” yang ditulis oleh Eman Sulaeman, magister lulusan Universitas Ibnu Khaldun yang sekarang menjadi Sekretaris Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia korda Bogor (2014-sekarang). Di dalamnya peneliti menegaskan 3 poin yaitu identitas, pandangan terhadap relasi agama dan politik dan yang terakhir terkait dengan identitas Islam.

Kedelapan, sebuah artikel yang berjudul “Fiqh bagi Penyandang Disabilitas Mental: Telaah Hukum Islam terhadap Konsep *Ahlīyyah* dan *Maslahah*” yang ditulis oleh Muhammad Labib Syauqi tahun 2023, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri. Di dalamnya peneliti menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental masih mendapatkan perhatian yang minimal dalam formulasi hukum Islam dibandingkan penyandang disabilitas fisik. Syauqi mengidentifikasi kesenjangan antara konsep disabilitas mental yang dirumuskan ulama klasik dengan kompleksitas pemahaman disabilitas mental dalam diskursus kontemporer. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru melalui integrasi dua konsep usul fikih: *Ahlīyyah* (kecakapan hukum) dan *Maslahah* (kemaslahatan) sebagai kerangka istinbath hukum yang lebih komprehensif. Syauqi berpendapat bahwa penyandang disabilitas mental harus dilihat dari sisi kecakapan mereka untuk mempertahankan hak kemanusiaan mereka, namun dengan batasan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan sistem pendampingan dan dukungan dalam

pengambilan keputusan hukum Islam bagi penyandang disabilitas mental, sehingga menciptakan fikih yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Kesembilan, Artikel jurnal dengan judul “The Adverse Effects of Recruiting Non-Expert Officials (A Study of The Predictive Hadith: Entrusting Affairs to Non-Expert)” yang ditulis oleh Sitti Sagirah tahun 2023, mahasiswi UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda (2023). Di dalamnya peneliti menegaskan pentingnya analisis hadis prediktif tentang "Menyerahkan Urusan Kepada Bukan Ahlinya" dan implikasinya terhadap sistem rekrutmen pejabat publik. Sagirah menggunakan metode *tahlīlī* dan teknik interpretasi textual, intertekstual, dan kontekstual dengan pendekatan multidisipliner untuk mengkaji hadis tersebut. Penelitian ini melakukan *takhrīj al-hadīs* melalui kata kunci "*duyī'at al-amānat*" dan menyimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas *sahīh lighairihī* meskipun awalnya tergolong hadis *gharīb* dan *hasan* karena periyawat Fulaih yang kurang *dhabit*, namun terangkat derajatnya melalui jalur sanad al-Bukhari. Sagirah juga menekankan bahwa hadis ini memiliki otoritas hukum untuk dijadikan sebagai *hujjah* dalam konteks pengangkatan pejabat publik. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus kriteria kepemimpinan dalam Islam dengan menegaskan konsekuensi serius dari menyerahkan urusan publik kepada orang yang tidak berkompeten sebagai tanda kemunduran tata kelola pemerintahan.

Dari beberapa tulisan di atas, menunjukkan adanya interkoneksi beberapa aspek penting dalam kajian Islam kontemporer. Kusuma (2024) dan Sagirah (2023) menekankan pentingnya kompetensi dan integritas dalam kepemimpinan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, terutama hadis prediktif tentang konsekuensi menyerahkan amanah kepada bukan ahlinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mubarok (2024) yang menemukan kesenjangan antara ajaran hadis tentang kriteria pemimpin ideal dengan praktik pemilihan pemimpin di masyarakat. Penelitian Hikam (2025) dan Syauqi (2023) mengembangkan konsep *ahlīyyah* (kecakapan hukum) sebagai landasan teoretis untuk memenuhi hak penyandang disabilitas

dalam konteks keagamaan dan hukum Islam, mengintegrasikannya dengan konsep *maslahah* untuk menciptakan fikih yang lebih inklusif. Adapun Devi mengaplikasikan konsep *Istisnā'iyat At-Taklīf* untuk menganalisis pengecualian beban hukum bagi individu dengan kondisi khusus, yang relevan dengan diskusi tentang *ahlīyyah* dalam konteks keterbatasan kemampuan. Sementara itu, Muchtar (2019), Habibi (2017), dan Sulaeman (2014) membahas politik identitas dalam konteks pemilihan pemimpin dan relasi agama-politik di Indonesia, yang menjadi tantangan bagi implementasi konsep *ahlīyyah* dalam pengangkatan pemimpin berdasarkan kompetensi sebagaimana diajarkan dalam hadis tentang amanah, sehingga pendekatan hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl yang menekankan keseimbangan antara teks, pengarang, dan pembaca dalam menafsirkan hadis menjadi relevan untuk menganalisis politik identitas yang sering mengabaikan aspek kompetensi dalam memilih pemimpin.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian konsep yang berfungsi untuk identifikasi dan analisis masalah penelitian, membantu menetapkan perspektif terhadap isu yang akan dianalisis. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan pemikiran peneliti dalam topik yang dikaji, dengan harapan bahwa hasil penelitian akan tetap konsisten dengan fokus kajiannya.²⁰ Peneliti memilih pendekatan hermeneutika hadis Khāled Aboū El-Faḍl sebagai kerangka teoretisnya. Hermeneutika sendiri merupakan salah satu metodologi interpretasi teks simbolis.²¹ Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengungkap berbagai pola redaksional matan serta pemahaman isi matan hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual.

²⁰ Qotrun A, ‘Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya’ <<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/?srstid=AfmBOopJ-UNIB76Ref4aqyh4Jys3BsTPpoM1PloJ7w6IpoPHC6a7RMOL>>.

²¹ Nurkholis Hauqola, ‘Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks’, *THEOLOGIA*, 24.1 (2013), doi:DOI: <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>.

Diskursus hermeneutika sebenarnya telah lama hadir dalam kajian keislaman, terbukti melalui konsep nasakh mansukh dan asbab an-nuzul dalam studi al-Quran, serta *asbāb al-wurūd* dalam analisis hadis. Praktik-praktik ini merupakan bentuk upaya interpretasi terhadap kedua sumber utama ajaran Islam tersebut. Meskipun demikian, pada masa itu belum dikenal istilah hermeneutika secara eksplisit. Penggunaan terminologi hermeneutika dalam ranah studi keislaman, khususnya dalam bidang tafsir al-Quran dan syarah hadis, masih merupakan fenomena yang relatif baru.²²

Dalam konteks studi hadis, hermeneutika dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek pemaknaan, yaitu: 1) interpretasi dari dalam teks, yang dikenal sebagai hermeneutika teoritis atau romantik, bertujuan mengungkap makna objektif sesuai dengan maksud pencipta teks. 2) interpretasi terhadap aspek-aspek di sekitar teks, yang tidak lagi berfokus pada objektivitas makna teks, melainkan pada proses pemahaman itu sendiri, dengan psikologi pembaca atau penafsir menjadi fokus kajian. 3) interpretasi yang menantang teks, atau Meaning in Front of the Text, yang berupaya mengungkap berbagai kepentingan tersembunyi di balik teks dengan menganalisis hubungan mikro-makro antara teks dan konteks sosial. Pendekatan ketiga ini mengintegrasikan pemaknaan tekstual (yang cenderung melihat teks secara tertutup) dengan konteks masyarakat yang lebih luas dan beragam.²³

1. Hermeneutika Khāled Aboū El-Fadl

Konsep hermeneutika Aboū el-Fadl bermula dari keprihatinannya terhadap fenomena otoritarianisme dalam interpretasi teks keagamaan oleh institusi tertentu.²⁴ Ia mengkritik sikap *Council for Scientific Research and Legal Opinion* yang bertindak seakan mewakili otoritas ilahiah, yang menurut Khāled telah terjebak dalam pendekatan otoritarian ketika menafsirkan hadis-hadis bernuansa

²² Faisal Haitomi, ‘Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir’, *NUN: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, 5.2 (2019), doi:<https://doi.org/10.32495/nun.v5i2.90>.

²³ Hauqola, ‘Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks’.

²⁴ Lis Yulianti Syafrida Siregar, ‘Konstruksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Tentang Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)’, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2.2 (2016), p. 123, doi:10.24952/tazkir.v2i2.514. hal 123

misoginis. Lembaga tersebut dinilai melakukan interpretasi teks secara sewenang-wenang. Akibatnya, hukum Islam yang sejatinya bersifat dinamis, inklusif, dan menjunjung kesetaraan, justru menjadi terhambat perkembangannya, kaku, dan cenderung ekslusif. Praktik semacam ini menciptakan citra otoriter dan otoritarianisme dalam pemahaman Islam.

Aboū el-Fadl menekankan bahwa penentuan makna merupakan hasil dialog interaktif antara pengarang, teks, dan pembaca. Ketiga elemen ini harus berinteraksi secara proporsional tanpa ada pihak yang mendominasi.²⁵ Kesalahan prosedural dalam mengelola hubungan ketiga komponen ini berpotensi melahirkan otoritarianisme dalam pemikiran Islam. Permasalahan utama umumnya muncul pada level pembaca. Ketika pembaca memaksakan interpretasi tunggal pada teks, ia sesungguhnya telah mencederai integritas pengarang dan teks tersebut. Pembaca akan terus berkembang dan berubah, sementara pengarang dan teks tetap statis. Mengingat keterbatasan yang melekat pada diri pembaca sebagai manusia, Aboū el-Fadl berupaya menetapkan batasan-batasan untuk mencegah interpretasi yang sewenang-wenang.

Struktur Triadik dalam Hermeneutika Negosiatif Khāled Aboū El-Fadl berdiri di atas tiga pilar yang saling berhubungan: *Teks* yang memiliki kaidah bahasa tersendiri, bersifat otonom, terbuka untuk interpretasi dan tidak sepenuhnya memuat kehendak pengarang, dengan Al-Qur'an berposisi sebagai teks absolut dan Sunnah sebagai teks semi-absolut; *Pengarang (Author)* yang dalam konteks hukum Islam adalah Allah sebagai pengarang utama yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan namun tidak dapat sepenuhnya mengendalikan makna yang disampaikan; dan *Pembaca (Reader)* yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Wakil Khusus (*Special Agent*) berupa institusi atau ulama yang memiliki otoritas koersif seperti CRLQ, Komisi Fatwa MUI, Bahsul Masail, dan Majelis Tarjih, serta Wakil Umum (*Common Agent*) yang terdiri dari sarjana

²⁵ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Women*, 2014th edn (Oneworld Publications, 2001). 245-248

Muslim, non-Muslim, dan komunitas Muslim yang memiliki otoritas persuasif dalam proses interpretasi teks keagamaan.²⁶

Dalam rangka menghindari otoritarianisme dalam penafsiran teks, seorang penafsir baik yang bertindak sebagai wakil khusus maupun wakil umum harus memenuhi lima prasyarat fundamental dalam proses penetapan makna. Kejujuran (*honesty*) menjadi landasan awal, di mana penafsir harus mengakui keterbatasan pengetahuannya dan tidak berpura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak dikuasainya. Prasyarat ini diikuti oleh kesungguhan (*diligence*) dalam melakukan upaya penafsiran yang cermat dan hati-hati dengan tetap memperhatikan hak orang lain. Keseluruhan (*comprehensiveness*) menjadi aspek penting berikutnya, yang mengharuskan penafsir untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua nash yang relevan, tidak terbatas pada teks-teks tertentu saja. Rasionalitas (*reasonableness*) juga diperlukan dalam melakukan penafsiran dan analisis terhadap nash secara logis dan masuk akal. Akhirnya, pengendalian diri (*self-restraint*) menjadi penyeimbang yang menuntut penafsir untuk memiliki kerendahhatian dan kemampuan menahan diri dalam menetapkan makna teks, sehingga tidak jatuh pada klaim kebenaran yang bersifat mutlak dan sepihak. Berikut kutipan dari Khāled;

*"It is based on a conviction that is not restrained by external evidence such as a text. Therefore, the agent should be cognizant of the fact that a non-accessible, non-accountable, and non-transferable conviction could be considered by the Principal as a whimsical or capricious determination. Consequently, a conscientious agent would adhere to the requirements of honesty, diligence, self-restraint, comprehensiveness, and reasonableness in weighing the evidence between his or her īmān or personal relationship with the Principal and other pieces of evidence contained in the textual instructions."*²⁷

Metode hermeneutika negosiatif merupakan pendekatan interpretasi teks yang berjalan melalui tiga langkah operasional utama yang saling berkaitan.

²⁶ Muzayyin, ‘Hermeneutika Hukum Islam Khāled Aboū El-Faḍl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI’, *Potret Pemikiran*, Vol. 20.No. 1. hal 73

²⁷ El-Faḍl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Women*. hal 268

Dimulai dengan pemahaman fundamental tentang teks, pendekatan ini mengakui bahwa setiap teks memiliki kaidah bahasa tersendiri, tidak sepenuhnya mewadahi kehendak pengarangnya, serta bersifat otonom dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Tahapan berikutnya adalah pengujian autentisitas teks sebagai fondasi kompetensi, dengan mengakui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, menerima autentisitas Al-Qur'an tanpa keraguan, serta melakukan analisis dan pengujian kritis terhadap autentisitas teks Sunnah untuk memastikan otoritasnya. Pertanyaan ini seperti yang dikemukakan Khāled ialah sarana yang paling meyakinkan adalah al-Qur'an dan sunnah. Menurutnya, dua sumber Islam inilah menduduki posisi tertinggi berisi tentang seperangkat perintah yang berfungsi sebagai sarana mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Berikut kutipan dari Khāled;

*"The Qur'an and Sunnah are texts in the sense that they are comprised of symbol (letters and words) that invoke meaning in a reader. These texts have an author and use linguistic symbols to signify meaning. One could consider the Qur'an and Sunnah to be, in part, a set of instructions intended to address an audience. Their authoritativeness is derived from the fact that they either come from God or that they tell us something about what God is instructing us to do."*²⁸

Tahap akhir berupa Penetapan makna teks dalam hermeneutika negosiatif melibatkan empat dimensi interpretasi yang saling melengkapi dan berkesinambungan. Pada tingkat pertama, kita berhadapan dengan makna asli (*orisinal*) yang menempatkan teks sebagai titik pusat terbuka, melacak maksud awal pengarang, fokus pada makna tekstual sebagaimana tertulis, serta memisahkan subjektivitas penafsir dari struktur bahasa teks itu sendiri. Dimensi kedua adalah makna historis yang mengeksplorasi komunitas makna di sekitar teks (*reader* pertama), menganalisis konteks kemunculan teks (*asbāb al-wurūd*), mengidentifikasi asumsi-asumsi dalam komunitas interpretasi awal, memahami latar sosial-budaya saat teks diturunkan, serta mengidentifikasi audiens asli yang dituju. *Significant meaning* sebagai dimensi ketiga berupaya memahami pesan moral dan universalitas teks, menganalisis keseluruhan bukti terkait, mengumpulkan data-data

²⁸ El-Fadl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and Women.* hal 190

pendukung seperti hadis-hadis lain dan ayat Al-Qur'an, mengintegrasikan berbagai sumber untuk menyusun pemahaman komprehensif, serta melakukan kontekstualisasi awal. Dimensi terakhir adalah *implication meaning* yang menemukan makna baru dan aplikasi kontemporer, melakukan proses negosiasi antara pengarang, teks, dan pembaca, serta mengembangkan makna signifikan dengan mempertimbangkan aspek *preventive* (pencegahan), *curative* (penyembuhan), dan *rehabilitative* (pemulihan) untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian secara relevan dan bermakna.²⁹

2. Politik Identitas

Politik identitas dalam perjalanan Indonesia, seperti halnya hal - hal yang telah ada sejak lama. Hal ini berdasarkan fakta sejarah pada masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, maupun reformasi. Dalam pengertian ini, pembentuk semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan adalah identitas. Politik identitas muncul sebagai respon terhadap ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya, sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran kolektif untuk melakukan pengambilan kebijakan. Tanpa adanya identitas nasional, sulit untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia atas kejahatan yang dilakukannya, apalagi mengingat kondisi saat ini dimana negara ini terbagi menjadi beberapa daerah otonom. Walau begitu pada masa kolonial, praktik politik identitas juga dilakukan oleh penjajah.

Secara lugas, menurut Yeni Sri Lestari, Politik Identitas Indonesia muncul dan mengungkapkan nilai - nilainya sejak masa penjajahan dan berlanjut hingga saat ini. Munculnya politik identitas pada masa praktik ketatanegaraan disebabkan oleh lemahnya kohesi sosial di masyarakat pada masa itu. Identitas bangsa yang

²⁹ Annas Muslihin, 'Sifnifikasi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: Studi Atas Pemikiran Khaleed Abou El-Fadl' (DISERTASI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).hal 189-190

sudah merdeka, menurut sebagian orang, telah menghilangkan arti penting nasionalisme di tengah masyarakat.³⁰

Belakangan ini, nasionalisme belum menjadi fokus utama Politik Identitas di Indonesia; selain itu agama juga berperan. Kontribusinya sangat berarti terhadap sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini, tidak lepas dari perjuangan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat Islam. Pernyataan ini bukan sekedar retorika dan teatrikal belaka jika umat Islam ingin menggunakan identitas agamanya sebagai tameng dalam konflik, karena sejarah telah lama menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme di Indonesia saling memperkuat dan menciptakan hubungan yang harmonis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis riset pustaka (*library research*), yakni Penulis Mengumpulkan informasi, tulisan, dan karya ilmiah dengan membaca materi yang relevan dengan topik yang dibahas. Ini termasuk data primer dan sekunder yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Selanjutnya setelah penulis sudah mendapatkan data yang dicari, literatur tersebut disusun secara sistematis dengan menemukan point-point penting supaya pembahasan tidak meluas dari tema utama obyek penelitian. Kemudian sumber data yang sudah ada dikumpulkan dilakukan telaah mendalam data-data mengenai pandangan hadis kepemimpinan yang adil dengan menganalisis isi agar dapat menangkap pesan tersembunyi yang terdapat dalam pernyataan hadis.

Adapun pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitiannya, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan,

³⁰ Yeni Sri Lestari, ‘Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama’, *Journal of Politics and Policy*, 1.1, pp. 19–30, doi:10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Umi Aksara, 2003).

yaitu suatu jenis penelitian yang menghimpun data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, membandingkan, dan mengolah bahan-bahan objek penelitian.³²

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah berusaha menjelaskan nilai, ilmu dan prosesnya sebuah fenomena atau memahami isu-isu rumit suatu proses serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis serta bersifat ilmiah, dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian ini bertumpu pada fenomenologi yang merupakan landasan teoritis dalam penelitian kualitatif itu sendiri.

Beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan:³³

- a. Ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik.
 - b. Ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam.
 - c. Ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami.
 - d. Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan, dan yang terakhir
 - e. Ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update.
2. Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam prosedur penelitian.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah kitab hadis induk, yaitu kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan buku karya Khāled Aboū El-Fadl yang

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

³³ <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>

berjudul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Woman*. Penulis memperluas penelusuran hadis dengan memanfaatkan beberapa sumber utama selain karya yang telah disebutkan diatas. Untuk memperkaya kajian matan hadis, penulis mengintegrasikan referensi dari koleksi hadis otoritatif lainnya, yakni *Fathul Bārī Syarah Shahih Bukhari*, *Sunan Al-Kubra Lil Bayhaqi*, dan *Shahih Ibnu Hibban*. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga memanfaatkan sejumlah perangkat lunak pencari hadis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang tersebar di berbagai kitab hadis. Di antara aplikasi yang digunakan adalah *Jawāmi' al-Kalim*, *al-Jāmi' Lil Hadīs al-Nabawī* dan *Maktabah Syāmilah* serta *Jāmi' Khādim al-Haramain*.

b. Data Sekunder

Literatur ilmiah yang berkaitan dengan fokus kajian penulis, meliputi kitab-kitab hadis seperti *Rijal al-Hadis*, *Syarah al-Hadis*, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, *Tarikh*, dan *Mu'jam* (kamus bahasa Arab), jurnal, tesis, disertasi, serta sejumlah buku yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, merupakan contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada dua sumber, yaitu pertama sumber data primer dan yang kedua yaitu sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) atau sumber kepustakaan.³⁴ Karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan bukan penelitian lapangan, maka tentu instrumen penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berdasarkan daftar rujukan sebagai berikut:

- a. *Takhrij al-Hadīs*, menurut Syuhudi Ismail takhrīj hadis ialah Penelusuran pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis.³⁵ Metode *takhrij al-hadīs* adalah satu-satunya

³⁴ Abudinata, *Metodologi Studi Islam* (PT Raja Grafindo, 2001).

³⁵ Askolan Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” *”Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 02.01 (2016), p. 17.

metode yang tersedia untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi tentang hadis yang diteliti. *Takhrīj al-hadīs* adalah proses melacak atau mencari beberapa hadis dengan tema yang sama dari berbagai kitab sumber hadis asli, lengkap dengan matan dan sanad hadisnya.³⁶ Yakni penulis menggunakan software-software yang berkaitan dengan penelusuran hadis yaitu *Jawāmi' al-Kalim, al-Jāmi' Lil Hadīs al-Nabawī* dan *Maktabah Syāmilah* serta *Jāmi' Khādim al-Haramain*.

- b. *I'tibār al-Sanad*, Setelah selesainya kegiatan *Takhrīj al-Hadīs*, maka harus dilakukan *I'tibar versi masdar dari istilah i'tabara*. Dalam karyanya *Tafsīr al-Mutsthalah al-Hadīs*, Mahmud al-Thahhan mengklaim bahwa *al-I'tibar*, jika menggunakan bahasa, berarti berfokus pada satu hal untuk menemukan hal lain yang sebanding. *Al-I'tibār* mengacu pada proses pelacakan saluran sanad alternatif untuk hadits tertentu yang sanadnya hanya memiliki satu perawi untuk menentukan apakah ada lebih banyak perawi (untuk bagian sanad yang dimaksud). Menurut penafsiran ini, *i'tibār* digunakan untuk menentukan status sanad hadits hanya berdasarkan ada atau tidaknya perawi yang dianggap *mutābi'* atau *syahid*. Untuk mempermudah proses kegiatan *al-I'tibār*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang akan diteliti. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skemaitu, yakni: jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.
- c. Pemaknaan hadis, yaitu dengan memahami hadis secara textual dan kontekstual. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam melakukan pemaknaan secara kontekstual dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai penafsiran termasuk menggunakan metode Khāled Aboū El-Fadl.

³⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (PT Rineka Cipta, 1999).

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl, yang berangkat dari kritik terhadap interpretasi yang cenderung otoritatif. Penelitian ini menerapkan metodologi tersebut untuk mengkaji hadis-hadis tentang amanah. Proses dimulai dengan mengidentifikasi hadis atau tafsiran yang akan ditelaah, dilanjutkan dengan menggali makna literal dari hadis bersangkutan. Pendekatan tekstual ini berupaya memahami matan hadis sebagaimana adanya berdasarkan kaidah linguistik, sehingga pembaca dapat menyerap makna yang terkandung langsung dari redaksi yang tertulis.

Tahap berikutnya adalah penelusuran dimensi historis dengan mengkaji asbāb al-wurūd hadis tentang amanah. Bila informasi mengenai sebab munculnya hadis tidak tersedia, peneliti beralih pada pendekatan kesejarahan yang lebih luas. Metode ini mengakomodasi konteks sejarah pemikiran, kondisi sosial, situasi politik, dan keadaan ekonomi yang berkaitan dengan periyat serta konten hadis yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan historis berusaha menyelami hadis melalui eksplorasi mendalam terhadap konteks dan peristiwa yang melatarbelakangi kemunculannya.

Langkah selanjutnya adalah pencarian significant meaning atau pesan fundamental dari hadis yang diinvestigasi. Ini dilaksanakan melalui kompilasi berbagai sumber pendukung seperti hadis-hadis terkait, ayat-ayat al-Qur'an, catatan sejarah, dan referensi lainnya. Selama tahap ini, para ulama meneliti hadis untuk mencari prinsip-prinsip universal. Dari pemahaman universal tersebut, kemudian diturunkan makna implikasi yang bersifat inklusif dan egaliter, serta terbebas dari dominasi interpretasi sepihak, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan metodis tesis ini dibagi menjadi lima segmen yang saling terkait dan disusun secara metodis. Setiap bab dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama disertakan dalam pendahuluan, bersama dengan yang berikut: Informasi latar belakang yang menurut penulis penting untuk memperkenalkan tema ini. Batasan masalah yang akan dibahas penulis dikenal sebagai rumusan masalah. Tinjauan pustaka sebagai panduan untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya dalam studi terkait. Jenis dan strategi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan metode pemrosesan data yang telah dan akan dikumpulkan semuanya dijelaskan oleh metodologi penelitian. Terakhir, ada pembahasan metodis yang mencakup penyajian pembahasan dalam penyusunan penelitian tesis ini.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang ahliyyah dan amanah untuk memberikan landasan teoretis bagi analisis selanjutnya. Pembahasan diawali dengan pengertian ahliyyah dalam perspektif Islam, dilanjutkan dengan klasifikasi dan tingkatannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dipaparkan konsep amanah dalam Islam secara komprehensif. Bagian selanjutnya mengeksplorasi hubungan intrinsik antara ahliyyah dan amanah, diakhiri dengan pembahasan kontekstual keduanya dalam ranah sosial-politik.

Bab ketiga, berfokus pada kajian tekstual dan sanad hadis tentang amanah riwayat Abū Hurairah. Dimulai dengan deskripsi utuh hadis tersebut, dilanjutkan dengan i'tibar sanad yang memetakan jalur periwayatan. Analisis sanad mengevaluasi kredibilitas dan kebersambungan para perawi, sedangkan analisis matan mengkaji aspek linguistik dan konten hadis untuk memverifikasi keasliannya dan memahami makna literalnya.

Bab keempat, merupakan inti penelitian yang mengaplikasikan hermeneutika Khāled Aboū El-Faḍl terhadap hadis tentang amanah. Diawali dengan penjelasan metodologi hermeneutika yang ditawarkan Khāled, dilanjutkan dengan penelusuran makna asli dan historis hadis amanah. Kemudian dilakukan pencarian significant meaning yang mengungkap nilai-nilai universal dari hadis tersebut, dan diakhiri

dengan implication meaning yang merefleksikan relevansi dan implementasi kontemporer hadis dalam konteks sosial-politik masa kini.

Bab kelima adalah simpulan yang menyajikan temuan-temuan dari seluruh percakapan sebagai respons terhadap tantangan-tantangan yang telah dirumuskan. Lebih jauh, rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat ditawarkan untuk kemajuan penelitian tambahan dan penerapan temuan-temuan studi di dunia nyata.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hermeneutika Khaled Abou El-Fadl terhadap hadis riwayat Abu Hurairah tentang amanah, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal:

1. Konsep Ahliyah dalam Hadis

Hadis tentang amanah menegaskan bahwa kepemimpinan harus diserahkan kepada yang ahli (kompeten dan berintegritas). Melalui pendekatan hermeneutika, makna ahliyah tidak hanya mencakup kapasitas teknis, tetapi juga moral-spiritual, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada publik. Pemaknaan historis menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadikan ahliyah sebagai fondasi utama, di mana identitas primordial (suku, agama, atau golongan) tidak menjadi pertimbangan utama.

2. Relevansi dengan Politik Identitas di Indonesia

Fenomena politik identitas dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, seperti penggunaan isu agama dan etnis, bertentangan dengan prinsip ahliyah dalam Islam. Praktik ini cenderung mengaburkan penilaian objektif terhadap kompetensi calon pemimpin, berpotensi memicu polarisasi sosial, dan menggeser fokus dari substansi kebijakan publik. Hadis tentang amanah memberikan kriteria etis-religius untuk menyeleksi pemimpin, yakni dengan mengutamakan kapabilitas dan akhlak, bukan sekadar simbol identitas.

3. Integrasi Nilai Islam dan Kebangsaan

Penelitian ini memperkuat urgensi mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (seperti ahliyah) dengan prinsip kebangsaan (Pancasila) dalam sistem demokrasi Indonesia. Kepemimpinan yang berlandaskan ahliyah dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi dampak negatif politik identitas sekaligus memperkuat persatuan nasional.

B. Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti:
 - Mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan multidisiplin (seperti politik, sosiologi, dan psikologi) untuk memperkaya perspektif tentang relasi agama dan praktik demokrasi.
 - Meneliti hadis-hadis lain tentang kepemimpinan dengan metode hermeneutika kontemporer untuk merumuskan kriteria pemimpin ideal yang relevan dengan konteks kekinian.
2. Bagi Pemerintah dan Partai Politik
 - Merumuskan regulasi yang mengedepankan kompetensi dan rekam jejak calon pemimpin dalam proses seleksi, serta membatasi penggunaan narasi identitas dalam kampanye.
 - Meningkatkan literasi politik masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas, bukan primordialisme.
3. Bagi Masyarakat
 - Bersikap kritis dalam menanggapi isu identitas yang diinstrumentalisasi untuk kepentingan politik praktis.
 - Menguatkan kesadaran kolektif bahwa pemimpin yang ahli adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
4. Bagi Lembaga Keagamaan
 - Memperkuat peran ulama dan tokoh agama dalam menyosialisasikan konsep ahliyah sebagai bagian dari ajaran Islam yang selaras dengan nilai kebangsaan.
 - Menginisiasi dialog antarumat beragama untuk menangkal politik identitas yang berpotensi merusak kerukunan sosial.
5. Bagi Penelitian Lanjutan
 - Menyelidiki faktor-faktor struktural (seperti ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan) yang memicu maraknya politik identitas, serta merancang solusi berbasis prinsip keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Dar al-Nafa'is, 2001)
- A, Qotrun, 'Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya' <<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOopJ-UNIB76Ref4aqyh4Jys3BsTPpoM1Pl0J7w6IpoPHC6a7RMOL>>
- Abdillah, Ubed S, *Politik Identitas Etnis Pergaulan Tanpa Tanda Identitas* (Indonesiatera, 2002)
- Abdurrahman, Soejono dan, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (PT Rineka Cipta, 1999)
- Abudinata, *Metodologi Studi Islam* (PT Raja Grafindo, 2001)
- Adz-Dzahabi, Al-Imam al-Hafizh Syamsuddin, *Mizanul I'tidal Fi Naqdir Rijal Juz 4*, ed. by Ali Muhammad Al-Bajawi, Pertama (Daarul al-Ma'rifah li at-Taba'at wa Nasyr)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 11*, ed. by Syeikh Syuaib Al-Arnauth, Ketiga (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 13*, ed. by Syeikh Syuaib Al-Arnauth, Ketiga (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 13* (Daarul Hadis)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 14*, ed. by Syeikh Syuaib Al-Arnauth, Ketiga (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 15*, ed. by Syeikh Syuaib Al-Arnauth, Ketiga (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 7* (Daarul Hadis)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 9* (Daarul Hadis)
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala Juz 9*, ed. by Syeikh Syuaib Al-Arnauth, Ketiga (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Tadzhhib Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 10*, ed. by Majdi al-Sayyid Amin Ghunaym Abbas Ghunaym, Pertama (Al-Faruq Al-Hadits Li Ath-Thibaah wa An-Nasyr)
- _____, *Tadzhhib Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 7*, ed. by Majdi al-Sayyid Amin Ghunaym Abbas Ghunaym, Pertama (Al-Faruq Al-Hadits Li Ath-Thibaah wa An-Nasyr)
- _____, *Tadzhhib Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 8*, ed. by Majdi al-Sayyid Amin Ghunaym Abbas Ghunaym, Pertama (Al-Faruq Al-Hadits Li Ath-

Thibaah wa An-Nasyr)

_____, *Tadzhib Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 9*, ed. by Majdi al-Sayyid Amin Ghunaym Abbas Ghunaym, Pertama (Al-Faruq Al-Hadits Li Ath-Thibaah wa An-Nasyr)

_____, *Tadzkirat Al-Huffadz Juz 2*, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)

_____, *Tadzkirat Al-Huffadz Juz 3*, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)

_____, *Tarikh Islam Wa Wafiyat Al-Masyahir Wa Al-A'lam Juz 10*, ed. by Dr Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)

_____, *Tarikh Islam Wa Wafiyat Al-Masyahir Wa Al-A'lam Juz 5*, ed. by Dr Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)

_____, *Tarikh Islam Wa Wafiyat Al-Masyahir Wa Al-A'lam Juz 6*, ed. by Dr. Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)

_____, *Tarikh Islam Wa Wafiyat Al-Masyahir Wa Al-A'lam Juz 7*, ed. by Dr Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)

_____, *Tarikh Islam Wa Wafiyat Al-Masyahir Wa Al-A'lam Juz 8*, ed. by Umar Abdul As-Salam At-Tadmiry, Kedua (Daarul al-Kitab al-Arabi)

Adz-Dzahabi, Imam, *Tadzkirat Al-Huffadz Juz 1*, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)

Afandi, 'Kepemimpinan Di Dalam Islam Berdasarkan Pada Meritokrasi', 2021 <<https://muhammadiyah.or.id/2021/05/kepemimpinan-di-dalam-islam-berdasarkan-pada-meritokrasi/#:~:text=Meritokrasi%20Sebagai%20Asas%20Islam&text=%E2%80%9CApabila%20sebuah%20urusan%20atau%20pekerjaan,pada%20kemampuan%20dan%20karakter%20amanah.%gt;> [accessed 12 January 2025]

Ahmad Syafii Maarif, Martin Lukito Sinaga, Siti Musdah Mulia, Eric Hiariej, *Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. by Husni Mubarok, digital (Democracy Project: Yayasan Abad Demokrasi, 2012)

Al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Jilid 1* (Darul al-Ma'rifah)

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Al-Isabah Fi Tamayiz Al-Sahabah Juz 4*, ed. by Syaikh Adil Ahmad Abdul Maujud dan Syeikh Ali Muhammad Muawwad, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)

_____, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Jilid 11* (Darul al-Ma'rifah)

_____, *Tahdzib Al-Tahdzib Juz 11*, Pertama (Matba'ah Dairat al-Ma'rif an-Nadzamiyah)

_____, *Tahdzib Al-Tahdzib Juz 7*, Pertama (Matba'ah Dairat al-Ma'rif an-Nadzamiyah)

- _____, *Tahdzib Al-Tahdzib Juz 8*, Pertama (Matba'ah Dairat al-Ma'arif an-Nadzamiyah)
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib Juz 9*, Pertama (Matba'ah Dairat al-Ma'arif an-Nadzamiyah)
- _____, *Taqrib At-Tahdzib*, ed. by Muhammad Awwamah, Pertama (Dar ar-Rasyid)
- Al-Baghdadi, Al-Khathib, *Tarikh Baghdad Juz 13*, ed. by Dr basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)
- _____, *Tarikh Baghdad Juz 5*, ed. by Dr. Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Daarul al-Gharbi al-Islami)
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *As-Sunan Al-Kubra Juz 10* (Majlis Dairoh al-Ma'arif al-Umaniyyah, 1355)
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, Kedua (Muassasah Ar-Risalah)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Dar al-Ma'rifah, 2010)
- Al-Hajj, Ibn Amir, *Al-Taqrir Wa Al-Tahbir* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983)
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 8*, ed. by Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, Pertama (Dar al-Turuq al-Najah)
- _____, *Shahih Bukhari Juz 9*, ed. by Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, Pertama (Dar al-Turuq al-Najah)
- Al-Juwayni, Imam al-Haramain, *Ghiyath Al-Umam Fi Iltiyath Al-Zulam* (Wazarat al-Shu'un al-Diniyyah, 1979)
- Al-Māwardi, *Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah* (Dar al-Hadis, 2006)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Dar al-Hadis, 1960)
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 1*, ed. by Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 10*, ed. by Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 19*, ed. by Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 2*, ed. by Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Muassasah Ar-Risalah)
- _____, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 20*, ed. by Basyar Iwad Ma'ruf, Pertama (Mu'assasah al-Risalah)

- _____, *Tahzhib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal Juz 24*, ed. by Basyar Awwad Ma'ruf, Pertama (Muassasah Ar-Risalah)
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Dawr Al-Qiyam Wal-Akhlaq Fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* (Maktabah Wahbah, 1995)
- 'Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019)
- Al-Sanhuri, Abdurrahman al-Razzaq, *Masadir Al-Haqq Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar al-Nahda al-'Arabiyyah, 1967)
- Al-Sarakhsy, Shams al-Din, *Ushul Al-Sarakhsy* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz 4*, ed. by Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (al-Maktabah al-Asriyyah)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah* (Dar al-Ma'rifah, 1997)
- Al-Tahhan, Mahmud, *Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis.*, I (IMTIYAZ, 2015)
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din, *Al-Bahr Al-Muhit Fi Ushul Al-Fiqh* (Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1992)
- Al-Zuhaili, Muhammad Mushtaha, *Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī Juz 2* (Dār al-Khair, 2006)
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim Jilid 1*, ed. by Muhammad Fuad Abdul Baqi' (Dar Ihya at-Turats al-Arabi)
- _____, *Shahih Muslim Jilid 3*, ed. by Muhammad Fuad Abdul Baqi' (Dar Ihya at-Tutats al-Arabi)
- Analiansyah, 'Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia', *Conference Proceedings – ARICIS I*
- Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim, *Al-Jarhu Wat Ta'dil Juz 7*, Pertama (Dar Ihya at-Turats al-Arabi)
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tabaqat Al-Huffadz*, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam* (Dar al-Andalus, 1980)
- Atmari, 'Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3.1, pp. 333–42
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Jilid Ke-1* (Dar al-Fikr, 1986)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- El-Fadl, Khaled Abou, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority and*

Women, 2014th edn (Oneworld Publications, 2001)

Even Benanda, Mutiara Tresna Parasetya, ‘Analisis Pengaruh Tata Kelola Corporate Sosial Responsibility Dan Kinerja Corporate Sosial Responsibility Berorientasi Lingkungan Dan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia’, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 10.No 4 (2021) <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>>

Faisal, Ismail, *Islam, Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia Dalam Susestiawan, Dkk, Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan* (UII Press, 1997)

‘Hadits Tentang Amanah Dalam Islam’, 15-12, 2021 <<https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-amanah-dalam-islam>> [accessed 17 January 2025]

Haitomi, Faisal, ‘Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir’, *NUN: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, 5.2 (2019), doi:<https://doi.org/10.32495/nun.v5i2.90>

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad Juz 2*, Pertama (Jam’iyah Maknaz al-Islami)

Hauqola, Nurkholis, ‘Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks’, *THEOLOGIA*, 24.1 (2013), doi:DOI: <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>

Hibban, Imam Ibnu, *At-Tsiqat Juz 8*, Pertama (Dairatul al- Ma’arif al-Utsmaniyah)

Ibrāhīm Mushthafa, Ahmad al-Ziyāt, Hāmid Abdul al-Qādir, Muhammad al-Najjār, *Al-Mu’jam Al-Wasīth* (Dār al-Da’wah)

Iriantara, Yosal, *Politik Identitas Dan Kegiatan Ekstrakulikuler* (PPS Uninus, nomor 2)

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Bulan Bintang, 1992)

Kerby, Steven, ‘Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia’, 20 April, 2024 <https://www.kompasiana.com/stevenkerby5508/6623bb13de948f670d193ab2/penyalahgunaan-wewenang-di-indonesia#google_vignette> [accessed 13 January 2025]

Khaldun, Abd al-Rahman Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Dar al-Qalam, 1967)

Khallaf, Abdurrahman al-Wahhab, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Dar al-Qalam, 1978)

‘Kumpulan Hadits Tentang Amanah Dalam Islam’, 10 November, 2021 <<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tentang-amanah-dalam-islam-1wssyxNW7ot/full>> [accessed 19 January 2025]

Lestari, Yeni Sri, ‘Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan

Agama’, *Journal of Politics and Policy*, 1.1, pp. 19–30,
doi:10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2

LPKIA, Admin, ‘Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Pentingnya Peningkatan Kompetensi’ <<https://lpkia.ac.id/peningkatan-kompetensi-era-revolusi-industri-4-0/#:~:text=Apa%20Revolusi%20Industri%204.0%3F,dan%20interaksi%20manusia%20dengan%20teknologi.&text=Revolusi%20Industri%20Ketiga%20yang%20ditandai,mulai%20awal%20abad%20ke-21>> [accessed 12 January 2025]

Lubis, Askolan, ““Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,”” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 02.01 (2016), p. 17

Mafaid, Ahmad, ‘Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh’, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020)

Makula, Abi Nasr Ibnu, *Al-Ikmal Fi Al-Asma' Wal Kuna Wal Ansab Juz 2*, Pertama (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah)

Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Abu al-Qasim ibn Habqah ibn, *Lisan Al-Arab*, ed. by pentahqiq 'Abdullah 'Ali Al-Kabir (Dar al-Ma'arif)

Manzur, Ibn, *Lisan Al-'Arab* (Dar Shadr, 1993)

Marsudi, Retno LP, ‘Kepemimpinan Global Di Era Krisis’, 23 September, 2020 <<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/23/kepemimpinan-global-di-era-krisis>> [accessed 13 January 2025]

Minhaji, Abdul Muis, ‘Otonomi Dan Reformasi Pendidikan’, *Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, Vol 3.No 1 (2018) <<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/edupedia/article/download/317/309>>

Muslihin, Annas, ‘Sifnifikasi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: Studi Atas Pemikiran Khaleed Abou El-Fadl’ (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Muzayyin, ‘Hermeneutika Hukum Islam Khāled Abou El-Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI’, *Potret Pemikiran*, Vol. 20.No. 1

Nambo, Abdulkadir B, and Rusdiyanto Puluhuluwa, ‘Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik’, XXI.2 (2005), pp. 262–85

Nurfaizah, Ayu, ‘Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024’, 2 Maret, 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_->

_website_traffic>

Nursyirwan, Abdulahanaa, Hasbi Siddik, ‘Nepotisme Golongan Dan Jabatan (Upaya Penggalian Nilai-Nilai Pengajaran Hukum Nepotisme Dalam Perspektif Hadis)’, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Volume 13.Nomor 2, <<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>>

Perdana, Andre Pebrian, and Muslih S Hi, ‘Impact of Identity Politics in The Future 2024 General Elections’, 11.2 (2024), pp. 225–38

Prof. Dr. Suryadi, MA & Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag., *Metodologi Penelitian Hadis*, ed. by M. Alfatih Suryadilaga, Cetakan I (TH-Press & Teras)

Putri, Amelia Riskita, ‘10 Hadis Tentang Amanah Dan Keutamaannya, Muslim Wajib Tahu!’, 06 February, 2024 <<https://www.orami.co.id/magazine/hadis-tentang-amanah>> [accessed 16 January 2025]

Qudamah, Muwaffaq al-Din Ibn, *Al-Mughni* (Maktabah al-Qahirah, 1968)

S., Romadhona, ‘Jadi Pemimpin Harus Yang Bagaimana? Ini 7 Ciri Pemimpin Dalam Islam Dan Rujukan Ayatnya’, 23 Januari, 2024 <<https://umsida.ac.id/7-ciri-pemimpin-dalam-islam-dan-rujukan-ayatnya>> [accessed 15 January 2025]

Salasah, Rebiyyah, ‘Tangkal Bahaya Politik Identitas Dengan Penguatan Dialog Lintas Iman’, 28 Januari, 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/28/tangkal-bahaya-politik-identitas-dengan-penguatan-dialog-lintas-iman?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic>

Santo, ‘Krisis Lingkungan Dan Respons Sosial Masyarakat’, 18 Juli, 2024 <<https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/07/krisis-lingkungan-dan-respons-sosial-masyarakat/#:~:text=Kesimpulan,yang baik bagi generasi mendatang>> [accessed 13 January 2025]

Schwartz, Shalom H., “Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values?”, *Journal of Social Issues*, Vo.1 50.No. 4 (1994) <<http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x>>

Siregar, Lis Yulianti Syafrida, ‘Konstruksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Tentang Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)’, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2.2 (2016), p. 123, doi:10.24952/tazkir.v2i2.514

Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Budaya Dasar Dan Konsep Umum Sosial* (PT. Eresco, 1995)

Sudarmanto, Cuk Subiyantoro dan, ‘Penerapan Metode CPI Dan ROC Untuk Penentuan Penempatan SDM’, *FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, Vol 21.No 3, doi:<https://doi.org/10.61805/fahma.v21i3.2>

Sukamto, ‘Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi “Lokalitas Dan Globalisasi”)', *Sejarah Dan Budaya Universitas Malang*, 2 (2010)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Umi Aksara, 2003)

Taqwa, Helin Titania dan Salma, ‘Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol 5.No 3 (2023), doi:<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>

Taymiyyah, Taqi al-Din Ibn, *Al-Siyasah Al-Shariyyah* (Dar al-Afaq al-Jadidah, 1998)

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr, 1958)

Zahrotunnimah, ‘Sejarah Politik Identitas Dan Nasionalisme Di Indonesia’, 2 (2018)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008)

